



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

2092

fy
01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

1. Ruang Lingkup

- a. Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) selaku Pengguna Barang;
- b. Petugas Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- c. BMN yang diperoleh atau dihasilkan dari dana APBN atau diluar APBN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Tujuan

- a. Pelaksanaan Pelaporan BMN bertujuan untuk memberikan penatausahaan yang berada di tingkat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR selaku Pengguna Barang agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai kekayaan negara.
- b. Melakukan Penertiban Penatausahaan BMN di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- c. Pedoman dalam melaksanakan penertiban Penatausahaan BMN di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- d. Memberikan Informasi sebagai bahan masukan untuk penatausahaan BMN;
- e. Memberikan informasi data sebagai bahan dalam merencanakan dan menentukan kebutuhan BMN;
- f. Memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk pengadaan BMN;

3. Ringkasan


Pelaporan BMN yang efektif, tertib, transparan dan akuntabel adalah salah satu bagian penting dari lingkup perbendaharaan negara yang harus dipenuhi guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat. Pelaporan BMN yang akuntabel dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran dan sebagai acuan untuk pengadaan BMN. Tahapan Pelaporan dimulai dari menyampaikan Laporan BMN Satker, memeriksa Neraca dan Menyusun Laporan BMN Eselon 1.

4. Definisi

- a. Satker Ditjen SDA adalah Pengguna Barang;
- b. Penelaah BMN adalah pihak yang melakukan tugas penelaah BMN sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK Satuan Kerja;
- c. ADK-SIMAK BMN adalah Arsip Data Komputer hasil dari backup pada aplikasi SIMAK-BMN
- d. CalBMN adalah Catatan Laporan Barang Milik Negara;
- e. Bar Internal adalah Berita Acara Rekonsiliasi Internal;
- f. SAIBA adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Accrual.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	09/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
DIUSULKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd  Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	PELAPORAN BMN
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas BMN dengan pendidikan minimal S12. Dapat mengoperasikan aplikasi SIMAK BMN beserta arsip data komputernya3. Memahami prinsip pembukuan dan pelaporan Barang Milik Negara berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah4. Mampu menganalisis data yang tidak normal dan kesalahan transaksi dalam SIMAK-BMN
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. PC Unit2. Laptop3. Flash Disk dan Hardisk Eksternal4. Koneksi Internet
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Akun Standar
10. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

KETERKAITAN

1. SOP Pembukuan Barang Milik Negara Eselon I Ditjen SDA
2. SOP Pelaporan Barang Milik Negara Eselon I Ditjen SDA
3. Proses Pengelolaan Barang Milik Negara Eselon I Ditjen SDA
4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Ditjen SDA

PERINGATAN

Keterlambatan dalam proses pelaporan Barang Milik Negara Eselon I akan menyebabkan terhambatnya proses penyusunan Laporan BMN Kementerian dan Laporan Keuangan Eselon I Ditjen. SDA.

**BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN BMN**

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				KETERANGAN					
		Satuan Kerja	Wilayah	Dirjen SDA	Setditjen SDA	Kabag Keuangan, BMN dan Barang Persediaan Bencana	Subkoor Evaluasi, dan Pelaporan Keuangan serta Pelaporan Pengendalian Intern	Penelaah Laporan BMN	DJKN	Biro PBMN	Kelengkapan	Waktu	Output						
1	Menyampaikan Laporan BMN Satker ke Wilayah dan Eselon I	○	▭																
2	Menganalisis ADK SIMAK-BMN Satuan Kerja						Belum Sesuai	◇											
3	Mengkompilasi ADK SIMAK-BMN Satuan Kerja kedalam SIMAK-BMN Eselon I							▭											
4	Menyajikan Neraca BMN Ditjen SDA							▭											
5	Memeriksa Neraca BMN Eselon I Ditjen SDA							▭											
6	Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA Eselon I Ditjen SDA							◇											
7	Mengesahkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal							▭											
8	Menyusun Laporan BMN Eselon I Ditjen SDA							▭											
9	Memeriksa Laporan BMN Eselon I Ditjen SDA							◇											
10	Mengesahkan Laporan BMN Ditjen SDA							▭											
11	Rekonsiliasi SIMAK-BMN E1 dengan DJKN																		
12	Menyampaikan Laporan BMN Eselon I ke Biro PBMN																		
13	Menyimpan dan memelihara data ADK SIMAK-BMN Satuan Kerja, Wilayah dan Eselon I																		

Keterangan Simbol:

○ Kegiatan mulai dan berakhir
▭ Proses atau kegiatan eksekusi

◇ Kegiatan Pengambilan Keputusan
→ Arah Proses Kegiatan

▭ Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

[Handwritten signature]

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA (NAMA SATKER)
NOMOR :**

Pada hari ini Tanggal Tiga Bulan Tahun , bertempat di Kantor (**Nama Satker**), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
NIP :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada (**Nama Satker**) , untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

II Nama :
NIP :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada (**Nama Satker**), untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal (**Nama Satker**) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Bulan sampai dengan , dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN :

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Desember 2019		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	POSISI BMN DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			
B	ASET TETAP			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya			
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tidak Berwujud			
3	Akumulasi Amortisasi			
4	Aset Lain-lain			
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

6	Akumulasi Amortisasi			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel			
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel			
B	BPYBDS			
C	Barang Hilang			
D	Barang Rusak Berat			
E	Aset BMN Eks DK/TP Sebelum 2011			
F	Total (I+II)			

Rincian terlampir

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Bulan sampai dengan , dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penata BMN

Petugas Akuntansi UAKPA

NIP.

NIP.

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(Nama Satker)

NIP.

LAMPIRAN II

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA ...(1)...

PERIODE ...(2)...

I. PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (*berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan BMN*)
- B. Entitas Pelaporan (*berisi uraian/informasi mengenai entitas pelapor*)
- C. Periode Laporan (*berisi penjelasan mengenai periode laporan*)

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

(menjelaskan kebijakan Penatausahaan BMN pada entitas pelapor, antara lain kebijakan penggolongan/kodefikasi, kapitalisasi, rekonsiliasi, dan penyusutan BMN)

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

...(1)... ...(2)... merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh ...(3)...

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada ...(2)... ini adalah sebesar Rp...(114)... (...dalam huruf...), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp...(15)... (...dalam huruf...) dan nilai mutasi yang terjadi selama ...(2)... sebesar Rp...(115)... (...dalam huruf...). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan

8
7
0

pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

(paragraf berikut diisi apabila mengelola dana yang berasal dari BA 999. Apabila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)

Selain memperoleh dana dari DIPA(3)..., dalam periode laporan ini(3)... juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp...(6)... (...dalam huruf...), dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp...(6)... (...dalam huruf...). Selanjutnya ...(1)... atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08) disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

(paragraf berikut hanya diisi oleh jenjang entitas pelapor UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB)

...(1)... ...(2)... merupakan himpunan dari LBKP pada ...(7)... Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas ...(8)... satuan kerja Kantor Pusat, ...(9)... satuan kerja Kantor Daerah, ...(10)... satuan kerja Dekonsentrasi, ...(11)... satuan kerja Tugas Pembantuan, ...(12)... satuan kerja BLU, dan satuan kerja ...(13)... (sebagaimana daftar satuan kerja terlampir).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; *(untuk tahunan)*
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada ...(3)...;

26 3

14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER ... (2) ...

1. Saldo Awal ... (2) ...

Nilai BMN per ... (14) ... menurut ... (3) ... adalah sebesar Rp ... (15) ... (...dalam huruf...) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp ... (16) ... (...dalam huruf...) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp ... (17) ... (...dalam huruf...).

(paragraf berikut diisi apabila terjadi perbedaan saldo awal)

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar Rp ... (18) ... (...dalam huruf...) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp ... (19) ... (...dalam huruf...) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp ... (20) ... (...dalam huruf...). Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. (21)
- b. (21) ..., dst.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara ... (2) ...

Mutasi BMN per ... (2) ... adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada ... (1) ... per ... (22) ... sebesar Rp ... (23) ... (...dalam huruf...), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp ... (24) ... (...dalam huruf...) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp ... (25) ... (...dalam huruf...).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
(26) (27)(28)(29)(30)
JUMLAH(31)(32)(33)

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp...(34)... yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp....(35)... (...dalam huruf...) dan kondisi usang senilai Rp...(36)... (...dalam huruf...).

b. Tanah

Saldo Tanah pada ...(1)... per ...(22)... sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...) Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas ...(38)... m² dengan nilai sebesar Rp ...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah seluas ...(40)... m² dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang seluas ...(42)... m² dengan nilai sebesar Rp ...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
..... (44) (45)
..... (44) (45)
..... (44) (45)

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
..... (46) (47)
..... (46) (47)
..... (46) (47)

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah ...(48)... bidang dengan nilai sebesar Rp ...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ... (50)... bidang dengan nilai sebesar Rp...(51)... (...dalam huruf...).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah (53)... m²/Rp ...(53)....

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh ...(3)..., yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa (54) (54)
..... (55) (55)

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut)

.....
.....(58)....

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp ...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp ...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp ...(43)... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin)
Saldo(59)... pada ...(1)... per ...(22)... sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar ...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam

huruf...) mutasi tambah jumlah barang...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang jumlah barang...(42)...(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(51)... (...dalam huruf...).

Dari jumlah...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Handwritten signature or initials in blue ink.

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang ...(sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut)... yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah (53) ...unit/Rp ...(53)...

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).

.....(58)...

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43).... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan)

Saldo(59)... pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak ...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43).... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59) (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(51)... (...dalam huruf...).

Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).

.....(58)...

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43).... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut)

Saldo(59)... pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak ...(38)...(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebanyak ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43).... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

26 3

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada ...(1)... per ...(22)... sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) ...(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya)

Saldo ...(59)... pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah ...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya)... tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ...(51)...(...dalam huruf...).

Dari jumlah ...(59)...(sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik (52) (52)
Rusak Ringan (52) (52)
Rusak Berat (52) (52)

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).

.....
.....(58)..

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (60) (60)
..... (60) (60)
..... (60) (60)

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (61) (61)
..... (61) (61)
..... (61) (61)

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ...(51)... (...dalam huruf...).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada ...(1)... per ...(22).. adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sebesar Rp... (43)... (...dalam huruf...).

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Handwritten signature and initials.

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)
..... (44) (45) (45)

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)
..... (46) (47) (47)

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada ...(1)... per ...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1 Tanah(121)(121)
2 Peralatan dan Mesin(121)(121)
3 Gedung dan Bangunan(121)(121)
4 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan(121)(121)
5 Aset Tetap Lainnya(121)(121)
JUMLAH(122) (122)

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (44) (45)
..... (44) (45)
..... (44) (45)

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
..... (46) (47)
..... (46) (47)
..... (46) (47)

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah ...(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(49)... (...dalam huruf...), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah ...(50)... kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp ...(51)... (...dalam huruf...).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah (53)... unit/Rp ...(53).... (paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).

.....(58)...

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(38)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (...dalam huruf...), mutasi tambah sejumlah ...(40)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)... (...dalam huruf...), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)... (...dalam huruf...).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
..... (62) (62) (62)
..... (62) (62) (62)
..... (62) (62) (62)

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada ...(1)... per ...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah (64) (64)
2. Peralatan dan Mesin (64) (64)
3. Gedung dan Bangunan (64) (64)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan (64) (64)
5. Aset Tetap Lainnya (64) (64)
JUMLAH (65) (65)

~
s P

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebanyak ...(66)... unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak ...(38)... unit, mutasi tambah sebanyak ...(40)... unit, dan mutasi kurang sebanyak ...(42)... unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah (123)
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)(124)

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif) (124)
Penghapusan Barang Bersejarah (125)

3. Barang Milik Negara pada ...(1)... Per ...(22)...

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada ...(1)... Per ...(22)... adalah sebesar Rp...(114)... (...dalam huruf...), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

~ s f

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra komptabel		Ekstra komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
	Sub Jumlah (1)	...(69)	...(70)	...(69)	...(70)	...(69)	...(70)
II	Aset Tetap						
1	Tanah	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
2	Peralatan dan Mesin	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
3	Gedung dan Bangunan	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
5	Aset Tetap Lainnya	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
6	KDP	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
	Sub Jumlah (2)	...(69)	...(70)	...(69)	...(70)	...(69)	...(70)
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
2	Aset Tak Berwujud	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)	...(67)	...(68)
	Sub Jumlah (3)	...(69)	...(70)	...(69)	...(70)	...(69)	...(70)
	Total	...(71)		...(71)		...(71)	

Handwritten signature and initials.

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada ...(1)... per ...(22)... per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra komptabel		Ekstra komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)
2	Gedung dan Bangunan	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)
4	Aset Tetap Lainnya	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)
	Sub Jumlah (I)	..(118)	..(119)	..(118)	..(119)	..(118)	..(119)
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)	..(116)	..(117)
	Sub Jumlah (II)	..(118)	..(119)	..(118)	..(119)	..(118)	..(119)
	Total	..(120)		..(120)		..(120)	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

~
3 8

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada ...(1)... per ...(22)... per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan(72)(73) (74)
2	Tanah(72)(73) (74)
3	Peralatan dan Mesin(72)(73) (74)
4	Gedung dan Bangunan(72)(73)(74)
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan(72)(73)(74)
6	Aset Tetap Lainnya(72)(73)(74)
7	KDP(72)(73)(74)
8	Aset Tak Berwujud(72)(73)(74)
9	Aset Lain-lain*)(72)(73)(74)
Total	(75)(76)(77)

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp...(77)... (...dalam huruf...) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1)
- 2)(78)...

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1(79)(80)(81)(82)
2(79)(80)(81)(82)
3 (79) (80) (81)(82)
4 (79) (80) (81)(82)
5 (79) (80) (81)(82)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada ...*(1)*... per ...*(22)*... adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (83) (84)
2	Peralatan Mesin (83) (84)
3	Gedung & Bangunan (83) (84)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (83) (84)
5	Aset tetap lainnya (83) (84)
Jumlah	 (85) (86)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(87)...

78

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)(88)(88)(88)(88)	...(89)
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang(88)(88)(88)(88)	...(89)
3	Dalam proses Pengelola Barang(88)(88)(88)(88)	...(89)
4	Selesai di Pengelola Barang(88)(88)(88)(88)	...(89)
	a.Dikembalikan(88)(88)(88)(88)	...(89)
	b.Ditolak(88)(88)(88)(88)	...(89)
	c.Disetujui(88)(88)(88)(88)	...(89)
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang(88)(88)(88)(88)	...(89)
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang(88)(88)(88)(88)	...(89)
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang(88)(88)(88)(88)	...(89)
8	Selesai serah terima(88)(88)(88)(88)	...(89)

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: *(bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)*

1.
2.(90)..

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)).

1.
2.(90)....

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle(91)
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola(91)
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola(91)
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna(91)
5	Selesai serah terima kepada Pengelola(91)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penyerahan BMN Idle tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)).

1.
2.(92)...

3. BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar SKPD yang sampai dengan per ...(22)... masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intra komptabel (neraca) (Rp)	Ekstra komptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	(93) (94)(95)(95)(95)
2	(93) (94)(95)(95)(95)
3	(93) (94)(95)(95)(95)
Total	(96)(96)(96)

Daftar SKPD yang sampai dengan per ...(22)... masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intra komptabel (neraca) (Rp)	Ekstra komptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	(93) (94)(95)(95)(95)
2	(93) (94)(95)(95)(95)
3	(93) (94)(95)(95)(95)
Total	(96)(96)(96)

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
...(97)(98)(99)(100)(101)
TOTAL	(102)(102)(102)

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999) (*diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi*).

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Intra komptabel (neraca) (Rp)	Ekstra komptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1	(103) (104)(105)(105)(105)
2	(103) (104)(105)(105)(105)
3	(103) (104)(105)(105)(105)
Total	(106)(106)106)

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang (*diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk tingkat UAKPB, jika tidak ada tidak perlu diisi*)

- a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (*...dalam huruf...*). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp...(126)... (*...dalam huruf...*) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp...(127)... (*...dalam huruf...*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada ...(1)... per ...(22)... dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total	(130)(131)

b. Daftar Barang Hilang.

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (...dalam huruf...). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp...(126)... (...dalam huruf...) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp...(127)... (...dalam huruf...). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada ...(1)... per ...(22)... dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total	(130)(131)

7. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total	(130)(131)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(112)...

26 8

8. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang.

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	(107) (108)(128)(129)
2	(107) (108)(128)(129)
3	(107) (108)(128)(129)
Total	(130)(131)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(111)...

9. BMN Berupa Barang BPYBDS

(diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi)

Terdapat BMN yang masuk sebagai Barang BPYBDS pada ...(1)... per ...(22)..., adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai
1	(107) (108) (109)
2	(107) (108) (109)
3	(107) (108) (109)
Total	 (110)

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa Barang BPYBDS tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(113)...

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a.;
- b.(132)...

11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a.;
- b.(133)...

Penanggungjawab ...(1)... ...(2)...

Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang

Nama lengkap (xxx)

NIP/NRP (xxx)

CARA PENGISIAN FORMAT
CATATAN ATAS LAPORAN BMN (CaLBMN)

1. Disesuaikan dengan jenis laporan dan jenjang pelaporannya, yaitu:
 - (a) Untuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/Satuan Kerja (satker), diisi dengan:
 - Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
 - (b) Untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UAPPB-W)/Koordinator Wilayah (korwil), diisi dengan:
 - Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
 - (c) Untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon I (UAPPB-E1)/Koordinator Eselon I, diisi dengan:
 - Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
 - (d) Untuk Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian/Lembaga (K/L), diisi dengan:
 - Laporan Barang Pengguna Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
2. Diisi periode pelaporan BMN.

Disesuaikan dengan jenis periode laporan, yaitu:

 - (a) Semester I/II Tahun Anggaran 20xx, untuk CaLBMN Laporan Semesteran;
 - (b) Tahun Anggaran 20xx, untuk CaLBMN Laporan Tahunan.
3. Diisi nama entitas penyusun laporan barang.
4. Diisi tanggal akhir periode pada laporan periode berjalan.

Contoh: per 31 Desember 2015 (*untuk laporan tahunan Tahun 2015*).

5. Diisi tanggal akhir periode pada laporan sebelumnya yang menjadi saldo awal pada laporan periode berjalan.
Contoh: per 30 Juni 2015 (*untuk laporan semester I Tahun 2015*).
6. Diisi total realisasi belanja yang menjadi BMN, baik persediaan maupun aset tetap.
7. Diisi jumlah satker yang dihimpun menjadi laporan (jumlah ditulis angka dan huruf).
8. Diisi jumlah satker Kantor Pusat (KP) yang dihimpun menjadi laporan (jumlah ditulis angka dan huruf).
9. Diisi jumlah satker Kantor Daerah (KD) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
10. Diisi jumlah satker Dekonsentrasi (DK) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
11. Diisi jumlah satker Tugas Pembantuan (TP) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
12. Diisi jumlah satker Badan Layanan Umum (BLU) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
13. Diisi jumlah satker lainnya selain KP, KD, DK, TP dan BLU yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
14. Diisi tanggal awal periode laporan periode berjalan, contoh: per 01 Januari 2012 (*untuk laporan tahunan 2012*). *boleh dicantumkan*
15. Diisi nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode laporan sebelumnya (yang menjadi nilai saldo awal laporan berjalan).
16. Diisi jumlah Nilai Neraca BMN (intrakomptabel) yang menjadi nilai saldo awal pada laporan periode berjalan, contoh: nilai neraca per 01 Januari 2012 untuk laporan tahunan 2012.
17. Diisi jumlah Nilai BMN ekstrakomptabel yang menjadi nilai saldo awal pada laporan periode berjalan, contoh: nilai neraca per 01 Januari 2012 untuk laporan tahunan 2012.

Handwritten signature and initials in blue ink.

18. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN gabungan (neraca dan ekstrakomptabel).
19. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN neraca/intrakomptabel.
20. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN ekstrakomptabel.
21. Diisi penjelasan dari entitas laporan terkait adanya perubahan saldo awal tersebut.
22. Diisi tanggal akhir periode pada laporan periode berjalan, contoh: per 31 Desember 2012 (untuk laporan tahunan 2012).
23. Diisi jumlah nilai saldo akhir persediaan (per tanggal akhir periode laporan) pada periode berjalan.
24. Diisi jumlah nilai saldo awal persediaan (per tanggal awal periode laporan) periode berjalan.
25. Diisi jumlah nilai bersih (net) mutasi persediaan (nilai saldo akhir dikurangi nilai saldo awal) pada periode berjalan.
26. Diisi kode akun neraca persediaan dirinci per akun neraca, contoh:
117111
27. Diisi uraian barang persediaan dirinci per kode akun neraca, contoh:
Barang Konsumsi.
28. Diisi nilai saldo awal barang persediaan dirinci per akun neraca, contoh:
10.000.000.
29. Diisi nilai bersih (net) mutasi barang persediaan per akun neraca, contoh: (500.000).
30. Nilai saldo akhir barang persediaan dirinci per akun neraca, contoh:
9.500.000
31. Jumlah/Total Saldo Awal Barang Persediaan.
32. Jumlah/Total Mutasi Barang Persediaan.
33. Jumlah/Total Saldo Akhir Barang Persediaan.
34. Jumlah/Total nilai barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
35. Nilai Persediaan yang kondisinya rusak.



36. Nilai Persediaan yang kondisinya usang.
37. Nilai saldo akhir BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
38. Jumlah kuantitas saldo awal BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
39. Jumlah nilai saldo awal BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
40. Jumlah kuantitas mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
41. Jumlah nilai mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
42. Jumlah kuantitas mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
43. Jumlah nilai mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
44. Diisi nama transaksi per jenis dan kode transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.

Jenis dan kode transaksi mutasi tambah pada pembukuan:

(a) 100 Saldo Awal	(p) 177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
(b) 101 Pembelian	(q) 199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya
(c) 102 Transfer Masuk	(r) 202 Pengembangan Nilai Aset
(d) 103 Hibah (Masuk)	(s) 204 Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas
(e) 104 Rampasan	(t) 205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset
(f) 105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(u) 206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi
(g) 113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	(v) 207 Koreksi Nilai Revaluasi
(h) 106 Pembatalan Penghapusan	(w) 208 Pengembangan Melalui KDP
(i) 107 Reklasifikasi Masuk	(x) 402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif
(j) 108 Bangun Serah Guna	
(k) 109 Bangun Guna Serah	
(l) 110 Kerjasama Pemanfaatan	
(m) 111 Pertukaran	
(n) 112 Perolehan Lainnya	
(o) 114 Reklasifikasi dari BPYBDS	

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

45. Diisi nilai mutasi tambah intrakomptabel/ekstrakomptabel per jenis transaksi yang berpengaruh sebagai mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
46. Diisi nama transaksi per jenis dan kode transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.

Jenis dan kode transaksi mutasi kurang pada pembukuan terdiri atas:

(a) 201 Pengurangan Nilai Aset	(h) 304 Reklasifikasi Keluar	(l) 308 Permohonan Barang
(b) 204 Koreksi Perubahan Nilai/ Kuantitas	(i) 305 Koreksi Pencatatan	Hilang ke Pengelola
(c) 205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(j) 306 Permohonan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(m) 399 Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya
(d) 207 Koreksi Nilai Revaluasi	(k) 307 Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset BPYBDS	(n) 401 Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
(e) 301 Penghapusan		
(f) 302 Transfer Keluar		
(g) 303 Hibah (Keluar)		

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

47. Diisi nilai mutasi kurang intrakomptabel/ekstrakomptabel per jenis transaksi yang berpengaruh sebagai mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
48. Diisi jumlah kuantitas BMN tersebut yang sebagian/seluruhnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku.

Pemanfaatan tanah pada pihak ketiga dapat berupa:

- (a) Sewa;
- (b) Pinjam pakai;
- (c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
- (d) Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG);
- (e) Pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.

Jika tidak terdapat informasi terkait, maka isian ini dapat ditiadakan.

49. Diisi jumlah nilai BMN tersebut yang sebagian/seluruhnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
50. Diisi jumlah kuantitas BMN tersebut yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
51. Diisi jumlah nilai BMN tersebut yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
52. Diisi jumlah nilai/kuantitas BMN tersebut yang kondisinya Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat (dipilih salah satu) pada periode laporan berjalan.
53. Diisi jumlah kuantitas/nilai BMN tersebut yang sudah dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah, karena berbagai sebab (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
54. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang sedang dalam kondisi sengketa, karena berbagai sebab (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
55. Permasalahan atas tanah selain 3 (tiga) hal di atas, disebutkan permasalahannya (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
56. Diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
57. Diisi dengan nama bidang dalam akun yang bersangkutan terdiri atas:

I. Akun Peralatan dan Mesin dengan perincian bidang barang sebagai berikut:	
1) Alat Besar (3.01)	11) Alat Eksplorasi (3.11)
2) Alat Angkutan (3.02)	12) Alat Pengeboran (3.12)
3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)	13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)
4) Alat Pertanian (3.04)	14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)
5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)	15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)
6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)	16) Alat Peraga (3.16)
7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)	17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)
8) Alat Laboratorium (3.08)	18) Rambu-Rambu (3.18)
9) Alat Persenjataan (3.09)	19) Peralatan Olah Raga (3.19)
10) Komputer (3.10)	




<p>II. Akun Gedung dan Bangunan dengan perincian bidang barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan Gedung (4.01) 2) Monumen (4.02) 3) Bangunan Menara (4.03) 4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)
<p>III. Akun Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan dengan perincian bidang barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan dan Jembatan (5.01) 2) Bangunan Air (5.02) 3) Instalasi (5.03) 4) Jaringan (5.04)
<p>IV. Akun Aset Tetap Lainnya dengan perincian bidang barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Perpustakaan (6.01) 2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02) 3) Hewan (6.03) 4) Ikan (6.04) 5) Tanaman (6.05) 6) Barang Koleksi Non Budaya (6.06) 7) Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)

Contoh:

Alat Besar (3.01)

Saldo "Alat Besar" pada "Nama entitas penyusun Laporan barang" per tanggal akhir periode laporan, contoh: per 31 Desember 2012 (untuk laporan tahunan 2012)...sebesar Rp.....(nilai BMN). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal kuantitas (unit/buah), saldo awal Nilai BMN (dalam rupiah) mutasi tambah kuantitas (unit/buah) Rp.....nilai BMN (dalam rupiah) mutasi kurang kuantitas (unit/buah) Rp.....nilai BMN (dalam rupiah).

Contoh tersebut berlaku untuk semua bidang barang pada setiap jenis akun.

58. Diisi nama transaksi per jenis transaksi dan nilai KDP yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah KDP pada laporan periode berjalan.

m 8
e

Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi tambah KDP pada pembukuan:

(a) 501 Saldo Awal KDP	(d) 504 Koreksi Nilai KDP (positif)
(b) 502 Perolehan/Penambahan KDP	(e) 506 Transfer Masuk KDP
(c) 503 Pengembangan KDP	(f) 508 Hibah Masuk KDP

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

59. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang KDP pada laporan periode berjalan.

Kode dan Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi kurang KDP pada pembukuan BMN:

(a) 504 Koreksi Nilai KDP (negatif)	(d) 509 Hibah Keluar KDP
(b) 505 Penghapusan/Penghentian KDP	(e) 599 Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi
(c) 507 Transfer Keluar KDP	

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

60. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan periode berjalan.

Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada pembukuan BMN adalah Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya dari Aset Tetap (188).

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

61. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan periode berjalan.

Kode dan Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada pembukuan BMN adalah:

- (a) 402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya
- (b) 391 Penghapusan (BMN yang dihentikan)
- (c) 392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)
- (d) 394 Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)
- (e) 393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)
- (f) 395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)
- (g) 396 Permohonan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)
- (h) 397 Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset BPYBDS (BMN yang dihentikan)
- (i) 398 Permohonan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)

Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

62. Diisi saldo akhir Nilai intrakomptabel/ekstrakomptabel BMN yang telah dihentikan penggunaannya per golongan barang .
63. Diisi total Saldo Akhir Nilai intrakomptabel/ekstrakomptabel BMN yang telah dihentikan penggunaannya per golongan barang.
64. Diisi jumlah kuantitas barang bersejarah.
65. Diisi nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per akun neraca pada akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
66. Diisi angka persentase untuk nilai tersebut dibandingkan dengan total nilai neraca BMN pada laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
67. Diisi jumlah Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
68. Diisi angka persentase untuk nilai tersebut dibandingkan dengan total nilai neraca BMN pada laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.

69. Diisi total Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
70. Diisi Nilai Saldo Akhir laporan barang intrakomptabel untuk kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
71. Diisi nilai neraca aset pada laporan keuangan untuk kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
72. Diisi selisih antara nilai neraca aset pada laporan keuangan dan laporan barang untuk akun neraca tersebut.
73. Diisi jumlah Nilai Saldo Akhir laporan barang intrakomptabel (neraca) pada laporan periode berjalan.
74. Diisi jumlah Nilai neraca aset pada laporan keuangan pada laporan periode berjalan.
75. Diisi jumlah Selisih antara nilai neraca aset pada laporan keuangan dan laporan barang.
76. Pengungkapan terkait adanya perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan, bila tidak terdapat selisih, maka uraiannya dapat diungkapkan sebagai berikut:
"Tidak terdapat perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan pada ... (1) per ... (22)."
77. Diisi jenis laporan yang sama dengan laporan periode berjalan selama 5 (lima) periode laporan terakhir, contoh: untuk penyusunan laporan Tahunan TA 2012, maka laporan sejenis untuk 5 (lima) periode laporan terakhir adalah *laporan Tahunan TA 2008, laporan Tahunan TA 2009, laporan Tahunan TA 2010, laporan Tahunan TA 2011, dan laporan Tahunan TA 2012.*
78. Diisi nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode laporan tersebut.
79. Diisi perubahan nilai BMN antara jumlah laporan gabungan periode tersebut dibandingkan dengan nilai BMN pada periode sebelumnya.
80. Diisi persentase perubahan nilai BMN antara jumlah laporan gabungan periode tersebut dibandingkan dengan nilai BMN pada periode sebelumnya.
81. Diisi nilai dari BMN yang sudah ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.



82. Diisi nilai dari BMN yang belum ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
83. Diisi jumlah Nilai dari BMN yang sudah ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
84. Diisi jumlah Nilai dari BMN yang belum ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
85. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
86. Diisi jumlah paket permohonan status penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan/penghapusan pada tahap proses tersebut, pada periode laporan berjalan.
87. Diisi jumlah total paket permohonan pengelolaan BMN pada tahap proses tersebut, pada periode laporan berjalan.
88. Diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan permohonan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
89. Diisi jumlah paket permohonan terkait pengelolaan BMN *Idle*, pada periode laporan berjalan.
90. Diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan permohonan pengelolaan BMN *Idle* tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
91. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan>
Contoh: 026.06.0100.123456.DK
92. Diisi uraian nama satker, contoh: *Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta*.
93. Diisi saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel/ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
94. Diisi total Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel/ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
95. Diisi kode satker BLU.

96. Diisi nama Satker BLU.
97. Diisi nilai BMN perolehan aset tetap satker BLU untuk satker tersebut pada laporan periode berjalan.
98. Diisi Nilai Akumulasi Penyusutan satker BLU pada laporan periode berjalan.
99. Diisi Nilai Buku satker BLU pada laporan periode berjalan.
100. Diisi total nilai perolehan/akumulasi penyusutan/nilai buku satker BLU pada laporan periode berjalan.
101. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan>
Contoh: 026.06.0100.123456.DK
102. Diisi uraian nama satker, contoh: *Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta.*
103. Diisi nilai BMN Intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang berasal dari BA.999.07. dan BA.999.08.
104. Diisi total nilai BMN Intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang berasal dari BA.999.07. dan BA.999.08.
105. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan>
Contoh: 026.06.0100.123456.DK
106. Diisi uraian nama satker, contoh: *Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta.*
107. Diisi nilai BMN yang menjadi BPYBDS untuk satker tersebut pada laporan periode berjalan.
108. Diisi jumlah nilai BMN yang menjadi BPYBDS pada *entitas laporan* tersebut.
109. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

110. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Peminangan, Pemusnahan, atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.
111. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN berupa BPYBDS tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
112. Diisi nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
113. Diisi jumlah nilai mutasi BMN pada laporan periode berjalan.
114. Diisi nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per akun neraca pada akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
115. Diisi angka persentase untuk nilai akumulasi tersebut dibandingkan dengan total nilai akumulasi penyusutan pada laporan periode berjalan.
116. Diisi jumlah nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
117. Diisi angka persentase untuk jumlah nilai akumulasi kelompok akun neraca tersebut dibandingkan dengan total nilai akumulasi penyusutan pada laporan periode berjalan.
118. Diisi total nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
119. Diisi nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga intrakomptabel /ekstrakomptabel per golongan barang pada laporan periode berjalan.
120. Diisi jumlah nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga intrakomptabel/ekstrakomptabel per golongan barang pada laporan periode berjalan.
121. Diisi jumlah perolehan/penambahan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena transaksi perolehan pada periode berjalan.
122. Diisi jumlah penambahan/pengurangan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena perubahan/koreksi pada periode berjalan.
123. Diisi jumlah penghapusan/pengurangan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena transaksi perolehan pada periode berjalan.

124. Diisi nilai saldo akhir Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-intrakomptabel pada periode berjalan.
125. Diisi nilai saldo akhir Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-ekstrakomptabel pada periode berjalan.
126. Diisi nilai perolehan Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
127. Diisi nilai buku Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
128. Diisi jumlah nilai perolehan Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
129. Jumlah nilai buku Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
130. Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN.
131. Diisi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

29

8